



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2020/Periodik - 2019)

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT KERJA** : PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA  
**SUB UNIT KERJA** : PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **NASTITI DEWI**
2. Jabatan : **PANITERA PENGGANTI**
3. NHK : **417457**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 930.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/140 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 50 m2/50 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 87 m2/60 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 139.000.000**

1. MOBIL, SUZUKI CARRY MINIBUS Tahun 1987, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOBIL, SUZUKI APV MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
4. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
5. MOTOR, HONDA GL 1581 DF M/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp. 42.500.000****D. SURAT BERHARGA** **Rp. ---****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 292.467.417****F. HARTA LAINNYA** **Rp. ---**



Sub Total	Rp.	1.403.967.417
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.403.967.417

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **5 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.